

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Daerah Sleman

a. Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.⁶⁷

b. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32

⁶⁷ Pemerintah Kabupaten Sleman, Letak dan Luas Wilayah, <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019, pukul 16.00 WIB.

Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.⁶⁸

c. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Tempel (8 desa), sedangkan Kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Depok (3 desa).⁶⁹

Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Moyudan	4	65	2.762	33.595
2	Godean	7	57	2.684	57.245
3	Minggir	5	68	2.727	34.562
4	Gamping	5	59	2.925	65.789
5	Seyegan	5	67	2.663	42.151
6	Sleman	5	83	3.132	55.549
7	Ngaglik	6	87	3.852	65.927
8	Mlati	5	74	2.852	67.037
9	Tempel	8	98	3.249	46.386
10	Turi	4	54	4.309	32.544
11	Prambanan	6	68	4.135	44.003

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

12	Kalasan	4	80	3.584	54.621
13	Berbah	4	58	2.299	40.226
14	Ngemplak	5	82	3.571	44.382
15	Pakem	5	61	4.384	30.713
16	Depok	3	58	3.555	109.092
17	Cangkringan	5	73	4.799	26.354
	Jumlah	86	1.212	57.482	850.176

2. Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman

Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.

Fungsi dari dinas pariwisata mengacu pada Pasal 2, ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visi Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 : “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem *e-government* menuju *smart regency* pada tahun 2021”. Penjabaran dari visi tersebut adalah:

- a. Sejahtera : Suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Mandiri : Suatu keadaan di mana Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, meningkatnya kontribusi sektor lokal ekonomi daerah. Daya saing dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, kontribusi PAD terhadap pendapatan, nilai ekspor, tingkat pengangguran terbuka, kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Kontribusi sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan dan peningkatan nilai produksi industri.
- c. Berbudaya : Suatu keadaan di mana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan sikap berbudaya masyarakat adalah meningkatnya kenyamanan dan ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap bencana, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya kerukunan masyarakat, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya, serta perempuan dan anak yang semakin terlindungi.
- d. Terintegrasikannya Sistem e-government : Terintegrasinya sistem e-Govt, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik yang merupakan paduan sistem regulasi, kebijakan, sikap dan perilaku, yang didukung dengan teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan respon dan efektivitas yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam rangka menuju Smart Regency, yaitu

suatu kabupaten yang dapat memberikan layanan publik secara tepat, cepat, mudah, murah dan terintegrasi antar unit pemerintah dengan dukungan penggunaan teknologi informasi.

Selanjutnya, misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Sleman selama 5 tahun ke depan adalah:

- a. Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi pelayanan masyarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju good governance.

- b. Misi 2 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan baik dari sisi tenaga pendidik maupun prasarana, sarana penunjang pendidikan dan peningkatan manajemen pendidikan sesuai standar. Di bidang kesehatan, dengan layanan kesehatan yang sudah terakreditasi diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan tentu saja terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman.

- c. Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian dan peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Disisi lainnya penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan berbagai program yang bersinergi.

- d. Misi 4 : Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.

Misi ini dimaksudkan untuk mengelola infrastruktur khususnya untuk mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga perlu adanya formulasi penataan ruang yang baik agar sinergi antara berbagai aspek dengandaya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas, sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat dan produktif.

- e. Misi 5 : Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman berkembang dinamis, tetapi tetap tidak meninggalkan dan kehilangan budaya lokal yang luhur dan baik. Disamping itu terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Misi dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sleman tahun2006- 2025 dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 24.2 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kelola Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tugas Pokok Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman adalah Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman adalah “Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya Dan Terintegrasikannya Sistem E-Government Menuju Smart Regency Tahun 2021“.

Selanjutnya, misi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman adalah:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

4. Lokasi Wisata Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat kaya akan obyek wisata. Daya tarik wisata di Kabupaten Sleman di antaranya wisata alam, wisata candi, wisata museum, wisata agro, wisata pendidikan, wisata monumen, wisata kuliner dan wisata sejarah. Tempat wisata yang ada di Kabupaten Sleman antara lain:

- a. Candi Prambanan;
- b. Candi ratu boko;
- c. Candi Kalasan;
- d. Candi Ijo;
- e. Candi Sari;
- f. Desa Wisata Kaliurang;
- g. Sendratari Ramayana;
- h. Objek Wisata Monumen Jogja kembali (Monjali);
- i. Museum Affandi;
- j. Objek Wisata Kali Kuning;
- k. Museum Gunung Merapi;
- l. Museum Ullen Sentalu;
- m. Kinahrejo;
- n. Goa Jepang;
- o. Blue Lagoon Jogja;
- p. Jogja Bay Water Park;
- q. Kampung Teletubbies;
- r. Stonehenge Cangkringan;
- s. Bukit Klamong Merapi;
- t. Tebing Breksi;
- u. Tlogo Putri kaliurang;
- v. Lava Tour Merapi;
- w. Omah Salak sleman;
- x. Upside Down World;
- y. Taman Pelangi;
- z. Tlogo Muncar Kaliurang;
- aa. Candi Banyunibo;
- bb. Candi Sambisari;
- cc. The World landmarks Merapi Park;
- dd. Kids Fun Parktaman Gardu Pandang Kaliurang;
- ee. Agrowisata Bhumi Merapi.

B. Pembahasan

1. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata Kabupaten Sleman

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.⁷⁰ Desentralisasi pemerintahan diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah didalam meningkatkan daerah-daerah mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memilii pendapatan daerah.⁷¹

Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan), dan tanggung jawab tanpa dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Adapun unsur-unsur daripada Pemerintahan Daerah yaitu meliputi antara lain:⁷²

- a. Pemerintahan Daerah adalah subdivisi politik dari kedaulatan bangsa dan negara;
- b. Pemerintahan Daerah diatur oleh hukum;

⁷⁰ Deddy Supriady Bratakusumah dan dadang solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002, hlm. 1.

⁷¹ Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 85-86.

⁷² Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Gramedia Widayasarana Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 26.

- c. Pemerintahan Daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
- d. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan;
- e. Pemerintahan Daerah memberikan pelayanan dalam wilayah jurisdiksinya.

Alasan pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia dikarenakan wilayah Negara Indonesia yang sangat besar dengan rentang goegrafi yang luas dan kondisi social budaya yang beragam. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia dibagi dalam daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan.⁷³

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Di samping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.⁷⁴

Hakekat otonomi daerah adalah adanya hak penuh untuk mengurus dan melaksanakan sendiri apa yang menjadi bagian atau kewenangannya, oleh sebab itu otonomi daerah yang ideal adalah membutuhkan keleluasaan

⁷³ *Ibid, hlm 101.*

⁷⁴ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

dalam segala hal. Dengan begitu maka daerah berkewajiban untuk mengelola potensi daerah dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tujuan itu antara lain peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.⁷⁵

Secara spesifik misi utama dari penerapan otonomi daerah adalah keinginan untuk menciptakan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan daerah,serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Adanya otonomi daerah maka pengelolaan keuangan daerah diserahkan sepenuhnya kepada daerah, untuk dapat menjalankan kegiatan pemerintahan maka pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber keuangan yang cukup memadai.⁷⁶

Konsekuensi yang besar ditanggung pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, fungsi pemerintahan itu antara lain fungsi pelayanan masyarakat fungsi pelaksanaan pembangunan, dan fungsi perlindungan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan ketiga fungsi pemerintahan tersebut tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit, dalam situasi ini daerah pasti berusaha menggali dan memajukan potensi yang ada utamanya potensi sektor pariwisata guna memakmurkan daerah dan

⁷⁵ Kamaruddin Singka, Andi Samsu Alam, Nurlinah, *Analisis Potensi Pariwisata dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Baubau*, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4, Nomor 2, Juli 2011 (97-108)ISSN 1979-5645, hlm. 99.

⁷⁶ *Ibid.*

masyarakat setempat mengingat saat ini sudah menjadi otoritas daerah itu untuk mengatur dan membangun daerahnya.⁷⁷

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren secara proporsional maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi, yaitu:⁷⁸

- a. Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut;
- b. Kriteria akuntabilitas untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan yakni yang paling dekat dengandampak yang timbul adalah yang paling berwenang melaksanakan urusan pemerintahan tersebut;
- c. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggara urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dalam pelaksanaannya diharapkan kemampuan daerah untuk memperoleh dana atau anggaran belanjanya dapat ditingkatkan seiring dengan peningkatan kebutuhan daerah. Hal ini dikarenakan pelaksanaan otonomi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan implementasi otonomi sepenuhnya sangat diperlukan dana yang memadai. Oleh karena itu, melalui

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

Kabupaten/kota sebagai daerah otonom dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensinya yang dapat digali dari wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang menjadi sumber PAD dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyatnya serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah:⁷⁹

- a. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangannya, mengelolah dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya masing-masing; dan
- b. Ketergantungan kepada sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan negara. Dalam artian bahwa keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah, yakni perbandingan antara PAD dengan total penerimaan daerah dalam APBD yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Desentralisasi terdiri dari 4 jenis yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, desentralisasi fiskal dan desentralisasi ekonomi. Dari keempat desentralisasi tersebut, desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari seluruh jenis desentralisasi.

Desentralisasi fiskal yaitu pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di

⁷⁹ Parson Horota, Ida Ayu Purba Riani, Robert. M. Marbun, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura, "*Jurnal Keuda*", Vol.2 No. 1, ISSN 2477-7838, hlm. 6

bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran. Adanya implementasi desentralisasi fiskal yang bertolak ukur dari Pendapatan Asli Daerah harus diupayakan secara optimal karena Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk membiayai pelayanan dan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah.⁸⁰

Peranan PAD harus ditingkatkan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah. Hal ini dikarenakan PAD merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah.⁸¹

Tuntutan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah semakin besar dengan semakin banyaknya pelimpahan kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diharuskan

⁸⁰ Anastasia Sianturi, Samsiar Samsuddin, Tjahjanulin Domai, Peran Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu), "*Jurnal Administrasi Publik (JAP)*", Vol.2, No.3, Hlm. 558

⁸¹ Nafsi Hartoyo, Optimalisasi PAD untuk Peningkatan Kinerja Pemda, <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/417-artikel-perimbangan-keuangan/19684-optimalisasi-pad-untuk-peningkatan-kinerja-pemda>, diakses pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 23.00 WIB.

lebih kreatif untuk menggali secara maksimal sumber-sumber pembiayaan daerah yang potensial dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya karena hal ini sangat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Visi ekonomi dari otonomi daerah adalah bahwa pemerintah daerah diharuskan mampu menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional sekaligus mampu mengembangkan perekonomian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.⁸²

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.⁸³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daetah dalam

⁸² Agus, Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik* : Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Gava Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 398.

⁸³ Damang Averroes Al-Khawarizmi, Pendapatan Asli Daerah, <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>, diakses pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 23.00 WIB.

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁸⁴

Salah satu sumber dari PAD adalah dari sektor pariwisata, hal ini dikarenakan secara nasional sektor pariwisata mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena pariwisata memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut maka pembangunan sektor pariwisata harus terus ditingkatkan dengan mengembangkan pendayagunaan seluruh sumber dan potensi kepariwisataan yang ada serta menggali sumber-sumber baru, disamping itu berbagai komponen sektor yang terkait dengan sektor kepariwisataan dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan negara melalui devisa, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan dapat mendorong pembangunan daerah dalam menghadapi era globalisasi.⁸⁵

Aspek ekonomi pariwisata tidak hanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan pariwisata, seperti perhotelan, restoran, dan penyelenggaraan paket wisata akan tetapi banyak kegiatan ekonomi lainnya yang ikut terdorong oleh adanya kepariwisataan seperti transportasi, telekomunikasi, bisnis eceran dan kegiatan ekonomi lain yang menumbuhkan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitarnya. Pariwisata Indonesia telah dianggap sebagai sektor ekonomi penting. Bahkan sektor ini diharapkan akan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu bagi negara. Pariwisata merupakan salah satu kegiatan industri pelayanan dan jasa yang

⁸⁴ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011, hlm. 99.

⁸⁵ *Ibid.*

menjadi andalan Indonesia dalam rangka meningkatkan devisa negara disektor non migas.⁸⁶

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya.⁸⁷

Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan Daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan Kepariwisataaan yang terkait, baik dari aspek industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.⁸⁸

Pariwisata sebagai salah satu penggerak di sektor ekonomi dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Sektor pariwisata tidak hanya menyentuh kelompok-kelompok ekonomi tertentu tetapi dapat menjangkau ekonomi kalangan bawah. Masyarakat

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 99-100.

⁸⁷ Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015-2025.

⁸⁸ *Ibid*.

sekitar objek-objek wisata dapat mendirikan berbagai kegiatan ekonomi, misalnya tempat penginapan, layanan jasa (transportasi, informasi), warung, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menambah pendapatan masyarakat, sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan.⁸⁹

Pariwisata juga telah terbukti mampu menjadi solusi dalam menopang ekonomi Negara Indonesia. Industri pariwisata di berbagai daerah telah terbukti mampu memberi dampak positif yang cukup signifikan bagi perkembangan ekonomi, seperti : mampu menciptakan lapangan kerja, menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan daerah dan lain sebagainya.⁹⁰

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang devisa tiga besar di Indonesia, informasi terbuka dibutuhkan dalam dunia pariwisata, dimana peran utama tersebut yang harus selalu didapatkan dengan cara yang mudah, cepat, tepat, akurat dan murah.⁹¹

Wisata domestik di Indonesia termasuk tertinggi di dunia. Tentu kondisi objektif yang mendukungnya adalah dari jumlah penduduk yang besar dan negeri yang luas. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa,

⁸⁹ V. Indah Sri Pinasti, Fenomena Sosiologi Objek Wisata Sejarah Di Yogyakarta: Suatu Kajian Tentang Sosiologi Pariwisata, <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/download/3877/3355>, hlm. 48.

⁹⁰ Faizal Hamzah, Hary Hermawan, Wigati, *Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal*, Jurnal Pariwisata, Vol. 5 No. 3 September 2018, ISSN: 2355-6587, e-ISSN: 2528-2220 <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp>, hlm. 196.

⁹¹ Tri Akbar Handoko, "Perancangan Enterprise Architecture Layanan Informasi Kepariwisataaan Dengan Pendekatan Service Oriented Architecture, Studi Kasus : Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif", *Jurnal Kepariwisataaan Indonesia* Vol. 9 No. 4 Desember 2014 Issn 1907 - 9419, Hlm. 413.

potensi wisatawan lokal di Indonesia sangat besar. Belum lagi populasi kelas menengah yang tiap tahun terus bertambah.⁹²

Pariwisata merupakan suatu keseluruhan elemen-elemen terkait yang didalamnya terdiri dari wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri dan lain sebagainya yang merupakan kegiatan pariwisata. Pariwisata menjadi andalan utama sumber devisa karena Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki beraneka ragam jenis pariwisata, misalnya wisata alam, sosial maupun wisata budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.⁹³

Di Indonesia ada berbagai jenis tempat wisata yang tentunya sering kita kunjungi. Tempat wisata tersebut antara lain pantai, taman, laut, hutan, pegunungan, pusat perbelanjaan atau mall, tempat bersejarah, museum, sentra kuliner, danau, waduk, situ, kolam renang, alun-alun, pemandian air panas, kebun binatang, air terjun, taman bunga dan buah, dan lain sebagainya.

Daerah-daerah yang sejak awal berkomitmen penuh dengan pariwisata pun kini sudah semakin maju. Hal ini terjadi karena pariwisata terbukti bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, sejumlah PAD di beberapa daerah mengalami lonjakan tajam dengan pembangunan infrastruktur dan program-program pariwisata yang tepat sebagai kuncinya.

Kabupaten Sleman adalah salah satu daerah yang memiliki komitmen penuh dengan sektor pariwisata. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman

⁹² Tatang Rusata, "Kelas Menengah Baru Dan Tantangannya Bagi Industri Pariwisata Indonesia", *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol. 10, No. 1 Desember 2015 Issn 1907 -9419, Hlm. 27..

⁹³ Helln Angga Devy Dan R.B. Soemanto, "Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus Obyek Wisata Air Terjun Jumog Di Kawasan Wisata Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)", *Jurnal Sosiologi DILEMA*, Vol. 32, No. 1 Tahun 2017 ISSN : 0215/9635, Hlm. 34.

pada tahun 2018 sebesar Rp. 867. 643.469.527,46,-.⁹⁴ Dari pendapatan tersebut, sektor pariwisata Kabupaten Sleman mendulang pemasukan Rp205,6 Miliar. Pendapatan tersebut berasal dari berbagai tempat wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata. Selain itu pendapatan juga diperoleh dari pajak hotel dan restoran.

Jumlah Rp205,6 Miliar itu, menempati porsi 23% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima Sleman. Sektor pariwisata membukukan kontribusi hingga 23%. Angka ini menjadi bukti keberhasilan beberapa kebijakan pariwisata yang diterapkan di Sleman.⁹⁵

Untuk pendapatan yang berasal dari tempat wisata, Dinas Pariwisata berhasil mendapatkan Rp. 7.549.148.204,- yang berasal dari retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan tersebut penulis jabarkan dalam tabel dibawah ini:

No	Uraian	Target Setelah perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Daerah	6.154.500.000,-	6.477.334.800,-	105,25
	Retribusi Jasa Usaha	6.154.500.000,-	6.477.334.800,-	105,25
	Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah	77.000.000,-	99.511.800,-	129,24
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.077.500.000,-	6.377.823.000,-	104,94
2	Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah	980.000.000,-	1.071.813.404,-	109,37
	Pendapatan Dari Pengembalian	980.000.000,-	1.071.813.404,-	109,37
	Pendapatan Dari	900.000.000,-	954.447.704,-	106,49

⁹⁴ Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

⁹⁵ Cholis Faizi Sobari, Sleman Dulang Rp205,6 Miliar dari Pariwisata, <https://www.genpi.co/berita/4733/sleman-dulang-rp2056-miliar-dari-pariwisata>, diakses pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 23.00 WIB.

	Pengembalian Bagi Hasil Ratu Boko			
	Pendapatan Dari Pengembalian Bagi Hasil Taman Lampion	80.000.000,-	113.365.700,-	141,71

**Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
Tahun 2018 (di luar pajak hotel dan pajak restoran)**

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah untuk tiap bulannya dirinci sebagai berikut:

No	Bulan	Pendapatan Asli Daerah	%
1	Januari	Rp. 1.055.799.230	1,84
2	Februari	Rp. 1.723.630.429	3,01
3	Maret	Rp. 7.301.185.462	12,77
4	April	Rp. 2.946.125.110	5,15
5	Mei	Rp. 3.369.907.598	5,89
6	Juni	Rp. 3.970.609.048	6,94
7	Juli	Rp. 4.732.369.053	8,27
8	Agustus	Rp. 5.272.645.634	9,22
9	September	Rp. 5.815.012.422	10,17
10	Oktober	Rp. 6.400.666.041	11,19
11	November	Rp. 6.923.005.129	12,11
12	Desember	Rp. 7.648.660.004	13,38
13	Jumlah	Rp. 57.159.615.160	99,94

**Data Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Dinas Pariwisata Tahun
2018**

Adapun rincian penerimaan retribusi dari sektor pariwisata adalah:

No	Jenis Retribusi	Pendapatan Retribusi	%
1	Fasilitas Retribusi	Rp. 78.226.000	1,22
2	Fasilitas Kios kaliurang	Rp. 27.904.800	0,44
3	Kawasan Wisata Alam Kaliurang	Rp. 2.585.309.000	40,45
4	Menara Pandang	Rp. 157.401.000	2,46
5	Candi-Candi	Rp. 1.489.535.000	23,31
6	Kawasan Kaliadem	Rp. 2.052.865.000	32,12

**Data Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata di Dinas Pariwisata
Kabupaten Sleman**

Sedangkan rincian penerimaan retribusi objek wisata setiap bulannya adalah:

No	Bulan	Total Penerimaan Retribusi	%
1	Januari	Rp. 634.939.600	9,77
2	Februari	Rp. 487.751.500	7,63
3	Maret	Rp. 443.509.400	6,93
4	April	Rp. 629.601.000	9,85
5	Mei	Rp. 351.182.000	5,49
6	Juni	Rp. 542.907.800	8,49
7	Juli	Rp. 639.269.900	10
8	Agustus	Rp. 440.359.600	6,89
9	September	Rp. 454.814.000	7,11
10	Oktober	Rp. 425.467.900	6,65
11	November	Rp. 451.997.500	7,07
12	Desember	Rp. 899.481.200	14,07

Data Penerimaan Retribusi Objek Wisata Tahun 2018

Untuk itu data kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli daerah tiap bulannya adalah:

Bulan	PAD Sektor Pariwisata	Retribusi Objek Wisata	Kontribusi (%)
Januari	Rp. 1.055.799.230	Rp. 624.939.600	59,19
Februari	Rp. 1.723.630.429	Rp. 487.751.500	28,29
Maret	Rp. 7.301.185.462	Rp. 443.509.400	6,07
April	Rp. 2.946.125.110	Rp. 629.601.000	21,37
Mei	Rp. 3.369.907.598	Rp. 351.182.000	10,42
Juni	Rp. 3.970.609.048	Rp. 542.907.800	13,67
Juli	Rp. 4.732.369.053	Rp. 639.269.900	13,50
Agustus	Rp. 5.272.645.634	Rp. 440.359.600	8,35
September	Rp. 5.815.012.422	Rp. 454.814.000	7,82
Oktober	Rp. 6.400.666.041	Rp. 425.467.900	6,64
November	Rp. 6.923.005.129	Rp. 451.997.500	6,52
Desember	Rp. 7.648.660.004	Rp. 899.481.200	11,75

Data Kontribusi Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata 2018

Pendapatan besar ini adalah efek dari suksesnya pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam mengeksplorasi beberapa event, dan dari tingginya arus wisatawan yang selalu meningkat setiap tahun.

Kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman

No	Tahun	Jumlah wisatawan	Pertumbuhan
1	2015	5.057.032	25,74%
2	2016	6.036.723	2,39%
3	2017	7.226.593	35,81%
4	2018	8.531.738	18,06%

Berkembangnya sektor pariwisata sebagai sektor unggulan di Kabupaten Sleman didukung dengan adanya berbagai objek dan daya tarik wisata. Adapun daya tarik wisata di Kabupaten Sleman di antaranya wisata alam, wisata candi, wisata museum, wisata agro, wisata pendidikan, wisata monumen, wisata kuliner dan wisata sejarah. Disamping itu, keberadaan usaha sarana wisata di Kabupaten Sleman juga menjadi daya dukung bagi peningkatan wisatawan yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten.

Ibu wulan menyampaikan⁹⁶ banyaknya objek wisata di Kabupaten Sleman menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penyangga PAD di Kabupaten Sleman. Untuk itu Dinas Pariwisata terus melakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sleman terus ditingkatkan karena semakin tinggi wisatawan yang datang maka semakin besar pemasukan dari sektor pariwisata dalam menyumbang PAD.

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Wulan Wahyuningsih, S.E., M.M, Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, pada tanggal 7 Agustus 2019, pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.

Oleh karena itu besarnya pemasukan dari sektor pariwisata menjadikan pemerintah daerah melakukan upaya-upaya yang dianggap mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan pengawasan dan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Sleman.

Efektivitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah lembaga publik maupun kelembagaan privat sangat membutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan itu sendiri adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga organisasi yang bersangkutan.⁹⁷

Pengawasan itu sangat penting, karena merupakan salah satu usaha untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan dan keserasian antara penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah-daerah dengan Pemerintah, serta menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam suatu ikatan negara kesatuan. Pengawasan atas kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan sifatnya

⁹⁷ Makmur, *Efektifitas Kebijakan dan Kelembagaan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kesatu, Hal. 176.

yang dikenal antara lain pengawasan terhadap perda. Dalam hal ini perda yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain meliputi pembangunan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata, serta indikasi program pembangunan kepariwisataan dan pengawasan dan pengendaliannya.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan Daerah dengan tetap menempatkan kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan harus berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pengembangan kawasan, dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antardaerah, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, dengan mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pengawasan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Sleman terhadap pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara antara lain: kunjungan lapangan, rapat kerja dengan SKPD dan Dinas-Dinas Pemerintahan kabupaten Sleman dan melakukan Hearing dengan pimpinan

unit kerja. Kunjungan lapangan yang dilakukan biasanya menghadiri *event-event* pariwisata yang diadakan di tempat-tempat wisata. Dari kunjungan lapangan ini, Bupati dapat melihat kondisi tempat wisata dan juga dapat mendengar langsung aspirasi masyarakat disekitar tempat wisata.

Rapat kerja/ *hearing* dengan SKPD dan Dinas-Dinas Pemerintahan kabupaten Sleman dilakukan untuk mendapatkan laporan hasil pelaksanaan program-program dari setiap dinas. Dari rapat kerja ini juga dapat mengetahui progres dari program yang dijalankan, selain itu juga dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan, sehingga dapat mencari solusi bersama. Setelah *hearing* yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja dengan Bupati ternyata kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan atau tidak jalan sama sekali, maka Bupati memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Peran media masa dan masyarakat sebagai alat bantu pengawasan Pemerintah Daerah. Apabila terdapat laporan-laporan dan atau masukan-masukan dari masyarakat, maka Bupati akan melakukan pemanggilan kepada Dinas terkait, selain itu juga ada rapat kerja dengan dinas pendapatan. Kenyataan dilapangan ada beberapa unit kerja yang tidak mampu melaksanakan kegiatan baik disebabkan kesalahan dalam perencanaan ataupun tidak tepatnya manajemen yang diterapkan, akibatnya Kepala Daerah memutasikan pimpinan unit kerja dan menempatkan pimpinan unit kerja yang lebih professional.

Pengawasan yang dilakukan pada intinya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan daerah secara umum, sehingga program-program daerah dapat telaksana dengan baik. Sama halnya untuk sektor pariwisata pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah program yang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025 telah berjalan dengan baik atau belum dan mencari solusi atau memberikan rekomendasi agar pelaksanaan peraturan daerah ini berjalan dapat dengan maksimal.

Selanjutnya upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata menyiapkan dan melaksanakan program dan kegiatan antara lain:

a. Program Pengembangan Destunasi Pariwisata

- 1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
 - a) pemeliharaan lingkungan obyek wisata;
 - b) pembenahan lingkungan objek destinasi tempat wisata;
 - c) DED Penanda Kabupaten Sleman;
 - d) Penataan dan peningkatan sarana objek destinasi tempat wisata;
 - e) Pembenahan kawasan Tlogo Putru Kaliurang (Dana Alokasi Khusus 2018); dan

- f) Pengembangan kawasan Menara Pandang Jurang Boyong
(Dana Alokasi Khusus 2018).
- 2) Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
 - a) Sleman *Fashion Festifal 4*;
 - b) Sleman *Temple Run*;
 - c) *Tour de Prambanan* (Sepeda Sport);
 - d) Festival Kuliner.
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
 - a) Monev Pengembangan objek destinasi tempat wisata.
- 4) Pengembangan daerah tujuan wisata
 - a) Penyelenggaraan atraksi seni di objek destinasi tempat wisata;
 - b) Penyelenggaraan atraksi seni malam di objek destinasi tempat wisata
- 5) Pelaksanaan kerjasama pembangunan objek pariwisata bekerja sama dengan lembaga/dunia usaha
 - a) Kebijakan pengelolaan objek destinasi tempat wisata berbasis *Sustainable tourism development*.
- b. Pengembangan Kemitraan

Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata

 - 1) Penyusunan naskah akademik peraturan pengelolaan objek destinasi tempat wisata untuk perda pengelolaan wisata;
 - 2) Kajian wisata Lava Bantal, Goa Sentono dan Goa Jepang;

3) Kajian penyusunan *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif.

c. Pengembangan Desa Wisata

1) Peningkatan pembangunan Sarana prasarana desa wisata

- Pendampingan penataan dan pembangunan ruang/bangunan/icon untuk ciri khas masing-masing desa wisata.

2) Pengembangan daya tarik desa wisata

- a) Festival desa wisata (kuliner dan cinderamata);
- b) Promosi desa wisata.

Dalam rangka pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata terlebih dahulu menetapkan kawasan strategis pariwisata daerah dengan kriteria antara lain:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;

- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan memiliki potensi tren daya tarik wisata masa depan.

Dinas Pariwisata juga melaksanakan pembangunan kawasan Daya Tarik Wisata meliputi pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata Alam; Daya Tarik Wisata Budaya; dan Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia, diantaranya di daerah:

- a. kawasan Turi dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam dan agro,

dengan cara:

- 1) mengembangkan Desa Wisata Garongan, dan Desa Wisata Pulesari sebagai kawasan wisata berbasis alam;
- 2) mengembangkan Desa Wisata Trumpon, Desa Wisata Gabugan, Desa Wisata Kelor, dan Desa Wisata Ledoknongko sebagai kawasan wisata berbasis agro; dan
- 3) mengembangkan Desa Wisata Nganggring sebagai kawasan wisata berbasis peternakan kambing Peranakan Ettawa.

- b. kawasan Pakem dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam lereng

Merapi bagian selatan dan sekitarnya, dengan cara:

- 1) mengembangkan kawasan Kaliurang sebagai kawasan wisata berbasis rekreatif;
- 2) mengembangkan kawasan Turgo sebagai kawasan wisata berbasis lingkungan (ekowisata);
- 3) mengembangkan kawasan Kaliadem sebagai kawasan wisata berbasis minat khusus;
- 4) mengembangkan kawasan minapolis di Ngemplak sebagai kawasan wisata berbasis perikanan air tawar; dan
- 5) mengembangkan Museum Gunungapi Merapi dan lokasi erupsi kawasan lereng Merapi sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan kegunungpian.

c. kawasan Prambanan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya dan kuliner, dengan cara:

- 1) mengembangkan kawasan situs endapan gunung api purba Candi Ijo sebagai kawasan wisata berbasis budaya dan pendidikan;
- 2) mengembangkan kawasan Geoheritage Lava Bantal di Berbah sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan dan minat khusus;
- 3) mengembangkan kawasan sekitar Candi Sari, Candi Kalasan, Candi Sambisari, Candi Banyunibo, Candi Ijo, dan Candi Barong, sebagai kawasan wisata berbasis budaya, dan pendidikan;
- 4) mengembangkan kawasan Kalasan sebagai kawasan wisata berbasis kuliner ayam goreng;
- 5) mengembangkan kawasan pendukung di sekitar candi Prambanan dan situs Boko sebagai kawasan wisata berbasis ekonomi kreatif; dan
- 6) mengembangkan kawasan minapolis di Berbah sebagai kawasan wisata berbasis perikanan air tawar.

d. kawasan Ngaglik dan sekitarnya sebagai kawasan wisata perkotaan berbasis rekreatif dan kuliner, dengan cara:

- 1) mengembangkan kawasan pendukung Monumen Jogja Kembali sebagai kawasan wisata rekreatif dan kuliner;
- 2) mengembangkan kawasan Jalan Kaliurang, Jalan Damai, dan Jalan Palagan sebagai kawasan wisata kuliner dan rekreatif;
- 3) mengembangkan kawasan Minomartani sebagai kawasan wisata kuliner bakpia;
- 4) mengembangkan kawasan sepanjang Jalan Magelang sebagai kawasan belanja dan rekreatif; dan
- 5) mengembangkan kawasan lapangan Denggung sebagai kawasan wisata keluarga.

e. kawasan Depok dan sekitarnya sebagai kawasan wisata perkotaan berbasis pendidikan, kuliner, dan olah raga, dengan cara:

- 1) mengembangkan kawasan Stadion Maguwoharjo-Candi Gebang-Embung Tambak boyo sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan, olah raga, dan keluarga;

- 2) mengembangkan kawasan Seturan sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan dan kuliner; dan
 - 3) mengembangkan kawasan Berek sebagai kawasan wisata berbasis kuliner Gudeg.
- f. kawasan Minggir dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pertanian, dengan cara:
- 1) mengembangkan kawasan minggir sebagai kawasan wisata budidaya pertanian dan kerajinan hasil pertanian berbasis kearifan lokal;
 - 2) mengembangkan kawasan sepanjang Saluran Van der Wijk sebagai kawasan wisata berbasis sejarah;
 - 3) mengembangkan kawasan Moyudan sebagai kawasan wisata berbasis bentang alam persawahan dan kegiatan pertanian; dan
 - 4) mengembangkan kawasan Seyegan dan Godean sebagai kawasan wisata pertanian berbasis mina padidan produk olahan pertanian/perikanan.
- g. kawasan Desa Budaya dan/atau Desa Wisata yang saat ini tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan di Daerah, dengan cara:
- 1) mengembangkan atraksi lokal, unik dan indah baik alam, budaya, kerajinan dan kuliner di setiap desa wisata dan/atau desa budaya agar mampu memiliki ciri khas yang berkarakter dan unggul;
 - 2) mengembangkan sarana penunjang atraksi di Desa Wisata dan/atau Desa Budaya guna memberikan peningkatan pelayanan bagi wisatawan; dan
 - 3) melaksanakan peningkatan kapasitas pengelola Desa Wisata dan/atau Desa Budaya agar dapat memberikan pelayanan prima bagi konsumen untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan.

Ibu Wulan juga menyampaikan bahwa selain pembangunan dan pengembangan objek wisata, promosi atau pemasaran objek wisata juga merupakan hal yang sangat penting karena dengan promosi yang baik dan

menarik akan berdampak sangat signifikan dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek-objek wisata di Kabupaten Sleman.

Lebih lanjut disampaikan terkait promosi, Dinas Pariwisata telah memiliki dan melaksanakan program pengembangan promosi antara lain:

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

a) *Updating* data dan informasi kebudayaan dan pariwisata di *website*, media sosial;

b) Pengelolaan subdominan untuk keterbukaan informasi publik.

2) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

- Fasilitas komunikasi (blogger, media sosial, dan komunitas fotografi dan drone), Asosiasi dan Mahasiswa asing yang belajar di DIY melalui Famtrip

3) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

a) Promosi di media massa (pemuatan advertorial, *talkshow* radio, program tv);

b) Promosi di media massa (jumpa pers);

c) Promosi di media massa (sms *broadcast*);

d) Promosi di media massa (spot iklan);

e) Promosi di media massa (*running texts*);

- f) Pameran (PPD, GWBN Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sleman *Fair* di Jakarta);
 - g) Travel dialog (Jawa Barat/Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Lampung)
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
- Dokumen evaluasi pemasaran pariwisata.
- 5) Pengembangan statistik kepariwisataan
- a) Buku statistik kebudayaan dan pariwisata Sleman;
 - b) Prosil SKPD.
- 6) Pengembangan materi dan pusat informasi promosi pariwisata
- a) Materi promosi *Booklet* 7000 exp;
 - b) Materi promosi *Leaflet* 8000 exp;
 - c) Materi promosi, kalender *event* 1000 exp;
 - d) Materi promosi souvenir 5500 buah;
 - e) Peta wisata 4000 exp;
 - f) Materi promosi berupa video promosi 3 paket;
 - g) Vidiotron 15 paket;
 - h) Baliho 15 paket;
 - i) *Banner* 80 paket.
- 7) Penyelenggaraan event budaya dan pariwisata
- a) Gebyar pelangi budaya bumi merapi;

- b) Gebyar malam tahun baru di objek wisata dan destinasi wisata;
- c) *Tour de merapi*
- d) Festival merapi

b. Program Pengembangan Kemitraan

Pembangunan kemitraan pariwisata

- a) Operasional sekber jawva promo;
- b) Pendampingan BPPS dalam pelaksanaan promosi pariwisata Sleman.

Promosi pariwisata dan kualitas destinasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Promosi pariwisata tentunya tidak akan bermakna ketika kualitas destinasi yang ada tidak memadai. Begitu juga sebaliknya destinasi wisata yang baik juga tidak dapat menarik wisatawan tanpa adanya promosi pariwisata.

Peningkatan kualitas destinasi pariwisata yang ada tidak lepas dari meningkatnya kualitas destinasi itu sendiri dan kualitas sumberdaya manusia pengelola dan pendukung usaha pariwisata. Dalam upaya peningkatan destinasi pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman melakukan kunjungan ke Dinas Pariwisata Kota Denpasar untuk berbagi ilmu dan pengalaman terkait pengelolaan destinasi wisata.

Kunjungan ini tidak lepas dari keterlibatan Kabupaten Sleman dalam *Sustainable Tourism Development* bersama dengan Universitas Gadjah Mada.

Dari kunjungan ke Dinas Pariwisata Kota Denpasar, banyak informasi yang dapat diperoleh untuk mengembangkan destinasi pariwisata di Kabupaten Sleman, utamanya dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pendukung usaha pariwisata di Kabupaten Sleman, bertempat di Embung Kaliaji, Desa Wisata Sangurejo, Wonokerto, Turi dilaksanakan Perkemahan Bakti Saka Pariwisata Cabang Sleman mulai tanggal 19-21 April 2018. Acara pertika ini meliputi beberapa kegiatan seperti pemberian materi dan praktek jurnalistik, bincang desa wisata, materi pengenalan krida, makteri utama saka pariwisata, pentas seni , nonton bareng, berbagai lomba dan *launching* taman bermain di Desa Wisata Sangurejo.

Dari kegiatan-kegiatan di atas, diharapkan semua pihak baik Dinas pariwisata maupun masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam mensukseskan pariwisata di Kabupaten Sleman melalui berbagai inovasi kegiatan yang nyata dalam rangka menjaga nilai budaya dan seni tradisi yang sesuai dengan dinamika perkembangan zaman dan norma yang berkembang di masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman yang juga akan berpegaruh pada meningkatnya PAD Kabupaten Sleman dari sektor pariwisata.

2. Faktor Yang Menghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata Kabupaten Sleman

Adanya pengaturan mengenai otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah maka pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas yang berlaku dan tugas pembantuan. Pemberian wewenang pemerintah pusat kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terjadinya perubahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kualitas pelayanan yang juga melibatkan peran serta masyarakat.

Dengan otonomi daerah, setiap daerah dapat menggali potensi yang bisa dikembangkan, sehingga perkembangan masing-masing daerah dapat meningkat pesat. Terdapat berbagai sektor yang dapat dikembangkan salah satunya adalah sektor pariwisata.

Pariwisata memiliki peran besar dalam pembangunan nasional karena selain menghasilkan pendapatan dan sekaligus sebagai penghasil devisa, sektor pariwisata berkaitan erat dengan penanaman modal asing. Turis-turis yang datang ke Indonesia adalah termasuk mereka yang berhubungan bisnis dengan Indonesia.⁹⁸

Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik

⁹⁸ Deddy Prasetya Maha Rani, *Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang)*, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, hlm. 413.

wisata, usaha barang pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut. Industri pariwisata adalah suatu susunan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang berpergian.⁹⁹

Pariwisata di daerah-daerah sangatlah banyak bila mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada, pemerintah dan masyarakat daerah saling membantu dalam pengembangannya tersebut sehingga akan mengangkat segi ekonomi, budaya dan pendidikan daerah itu. Pariwisata sangatlah mampu dalam mengatasi masalah kesejahteraan bila dikembangkan secara profesional.¹⁰⁰

Sektor pariwisata sangat dimungkinkan karena ketersediaan berbagai potensi pariwisata yang ada serta dukungan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi. Sifat dari pariwisata itu sendiri yaitu dinamis, dimana suatu saat akan muncul titik puncak kejenuhan atau kebosanan bagi wisatawan untuk menikmati kondisi yang sudah ada, dan itu sangat berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan ke suatu objek wisata yang pastinya berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata.

Pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Sleman mempunyai arti yang sangat penting dan strategis, karena sektor ini merupakan salah satu sektor yang nantinya diharapkan mampu mendukung perkembangan pembangunan daerah dengan cara usaha ekonomi daerah, serta

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah.

Wilayah Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga memiliki magnet wisata yang patut dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisata andalan kabupaten Sleman berada di ujung utara yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah yaitu Taman Nasional Gunung Merapi, Kaliurang, kawasan wisata Kaliadem, *the lost world castle*, *jeep lava tour*, bunker Kaliadem dan masih banyak lainnya. Di sisi lain wisata edukasi sejarah pun juga ada seperti Museum Gunung Merapi, Museum Ullen Sentalu, wisata edukasi Omah Salak.

Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman pada tahun 2018 mendapatkan pemasukan Rp205,6 Miliar dari sektor pariwisata. Pendapatan besar ini adalah dikarenakan sukses mengeksplorasi beberapa event sehingga berdampak pada tingginya arus wisatawan. Jumlah Rp205,6 Miliar itu, menempati porsi 23% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima Sleman sepanjang 2018.

Optimalisasi kontribusi PAD dari pariwisata Sleman diperoleh dari pajak dan retribusi. Sepanjang 2018, retribusi Sleman dipatok Rp6,1 Miliar. Realisasi target tercapai hingga Rp7,2 Miliar.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan kunjungan wisatawan manca negara maupun wisatawan dalam negeri dapat menembus angka 10 juta pengunjung, naik dua juta pengunjung dibanding tahun 2018. Dengan meningkatnya target wisatawan yang datang ke

Kabupaten Sleman, maka pendapatan dari sektor pariwisata juga akan meningkat.

Kabupaten Sleman memiliki banyak potensi objek wisata yang dapat dijadikan sebagai destinasi tujuan wisata. Potensi ini meliputi wisata alam, sejarah, museum, budaya, peninggalan purba kala, kuliner dan desa wisata. Wisata daerah kabupaten Sleman jumlahnya cukup banyak dan menarik dikunjungi oleh wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Data Jumlah Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Sleman

No	Uraian Data	2014	2015	2016	2017	2018
	Obyek dan Daya Tarik Wisata	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Wisata Alam	4	4	4	4	4
2	Wisata Budaya	10	10	10	10	10
3	Wisata Agro	4	4	4	4	4
4	Desa Wisata	38	38	39	31	36
5	Wisata Pendidikan	5	5	5	5	5
6	Wisata Museum	10	13	13	14	14
7	Wisarta Moumen	2	2	2	2	2
8	Wisata Candi	12	12	12	12	12
9	Wisata Sejarah	11	11	11	11	11

Untuk dapat merealisasikan target tersebut, Dinas Pariwisata makin giat untuk mengembangkan desa wisata hal ini dikarenakan munculnya sejumlah destinasi wisata baru menjadi salah satu penyebab perbaikan penerimaan.

Desa wisata merupakan salah satu program desa yang dimaksudkan untuk menarik wisatawan dating dan mengunjungi desa tersebut. Kedatangan wisatawan diharapkan akan menambah pendapatan desa dan meningkatkan

kualitas hidup masyarakat di desa wisata tersebut.¹⁰¹ Pengembangan desa wisata juga dianggap mampu meminimalkan potensi urbanisasi masyarakat dari pedesaan ke perkotaan. Selain itu juga mampu mengurangi jumlah pengangguran yang ada di masyarakat setempat.

Terbentuknya desa wisata sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat setempat, pengembangan mutu produk wisata pedesaan, pembinaan kelompok pengusaha setempat. Hal ini karena keaslian suatu desa wisata menjadi daya tarik tersendiri. Perkembangan industri pariwisata yang dalam hal ini adalah desa wisata mempunyai dampak bagi ekonomi suatu wilayah, antara lain pemerataan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan pendapatan daerah.¹⁰²

Aspek produk wisata, pengembangan Desa Wisata harus menekankan prinsip-prinsip pengembangan produk sebagai berikut:¹⁰³

- a. Keaslian (*Authenticity*) ; Pola perjalanan wisata alternatif membawa wisatawan mencari pengalaman yang terkait dengan “Authenticity experience” atau pengalaman yang asli atau otentik. Pengalaman yang otentik ini didapatkan dari warisan budaya yang dijaga dan dilestarikan secara turun menurun oleh suatu masyarakat di suatu destinasi. Dalam hal pengembangan Desa Wisata, yang termasuk dalam hal-hal yang sifatnya otentik diantaranya adalah menjaga tradisi kelokalan, sikap atau kegiatan sehari-hari, nilai-nilai budaya serta fitur alam yang unik dari suatu desa.
- b. Tradisi Masyarakat Setempat (*Local Tradition*); Desa Wisata menyiratkan makna tradisi masyarakat setempat yang kuat. Tradisi merupakan sesuatu yang berakar dan melekat dengan kehidupan masyarakat di suatu daerah yang menjadi ciri atau karakter budaya yang dipelihara dari waktu ke waktu. Tradisi harus tetap dijaga dan

¹⁰¹ Mustofa Ahda, Pengembangan Desa Wisata Banguncipto, Jurnal Pemberdayaan, Vol.1, No. 1, Juli 2017, hlm. 90.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Ade Zaena Mutaqin, Pengembangan Desa Wisata dan Pembangyn Pariwisata Berkelanjutan, <https://wisatahalimun.co.id/pengembangan-desa-wisata>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019, pukul 21.00 WIB.

dilestarikan karena selain untuk menjaga identitas dari suatu masyarakat, tradisi yang kuat juga akan menjadi perhatian dan daya tarik sendiri bagi wisatawan. Dalam hal ini Desa Wisata, tradisi masyarakat ini dapat berupa suatu kearifan lokal (Local Wisdom), adat istiadat, kesenian musik maupun seni tari, pakaian adat serta makanan khas dari suatu Desa Wisata.

- c. Sikap dan Nilai (*Attitudes and Values*), Sikap dan nilai suatu kebudayaan perlu ditunjang tinggi terutama oleh masyarakat setempat untuk menghindari degradasi nilai akibat pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari kunjungan wisatawan. Apabila wisatawan menghargai sikap dan nilai warisan budaya serta pola kehidupan suatu masyarakat, maka masyarakat tersebut akan memiliki rasa kebanggaan tersendiri terhadap warisan budayanya, dimana hal ini akan membuat masyarakat menjaga, mempertahankan, dan melestarikan warisan budaya mereka. Desa Wisata yang memiliki masyarakat dengan sikap dan nilai-nilai yang baik akan membuat citra yang baik pula bagi Desa Wisata tersebut. Sikap dan nilai yang baik dapat ditunjukkan dengan perilaku yang baik, ramah terhadap wisatawan, dan tegas terhadap aturan-aturan yang dipegang.
- d. Konservasi dan daya dukung (*Conservation dan Carrying Capacity*), Pengembangan Desa Wisata harus menerapkan prinsip-prinsip pelestarian serta dalam hal pemampaatnya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Hal ini penting agar dengan berjalannya pembangunan pariwisata, kapasitas maksimum daya dukung (*Carrying Capacity*) dari suatu destinasi dalam menyokong kebutuhan berbagai pemamfaatan tidak akan merusak alam, budaya maupun lingkungan. Dalam pengelolaan Desa Wisata, upaya konservasi dapat dilakukan dalam pengaturan pola kunjungan, zonasi kawasan serta penetapan daya dukung fisik (lingkungan) dan non fisik (budaya dan masyarakat)

Pengembangan Desa Wisata harus didukung dengan Sumber daya Manusia yang berkualitas, berkompeten, memahami dan mengerti prinsip-prinsip dan konsep Desa Wisata, bekerja dengan jujur, totalitas serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap kewajibannya. Sumberdaya Manusia pengelola kegiatan Desa Wisata harus memiliki kemampuan penguasaan berbagai unsur lokalitas Desa sebagai kekuatan daya tarik utama.¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Ibid.*

Pengembangan Desa Wisata perlu didukung dengan manajemen atau pengelolaan dengan kelembagaan yang solid, fleksibel dan sederhana serta dinamis. Kelembagaan pengelolaan Desa Wisata seharusnya bersifat mandiri, melibatkan tokoh Desa dan masyarakat setempat serta berbasis pada asas manfaat bukan asas keuntungan, keterlibatan masyarakat lokal merupakan unsur utama dalam pengelolaan Desa Wisata ini untuk mengambil bagian aktif dalam semua proses, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, termasuk didalamnya pengusahaan kegiatan ekonomi yang bisa dikembangkan dari Desa Wisata dengan demikian masyarakat akan tumbuh rasa memiliki terhadap perkembangan pariwisata di desanya, sebagai pengelola sekaligus penerima manfaat.¹⁰⁵

Jumlah desa wisata di kabupaten Sleman sesuai data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman pada tahun 2018 tercatat sebanyak 47 desa wisata. Desa wisata merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan sektor pariwisata yang menyajikan pelayanan dan fasilitas yang dapat dinikmati oleh wisatawan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Semakin bertambah dan berkembangnya Desa Wisata di kabupaten Sleman menurut Ibu Wulan menjadi modal bagi Dinas Pariwisata khususnya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mengingat Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan 10 juta kunjungan wisata di 2019. Untuk itu Dinas Pariwisata akan semakin mengembangkan potensi budaya lokal yang

¹⁰⁵ *Ibid.*

ada di tiap desa wisata, terutama terkait atraksi keseniannya. Saat ini pihak desa sudah mulai menjadikan atraksi kesenian sebagai agenda tahunan sehingga akan terus menarik wisatawan untuk berkunjung.

Ibu Wulan menyampaikan terkait desa wisata, Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang pariwisata. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mempunyai peran penting dalam mengembangkan desa wisata di daerahnya yang nantinya akan terwujud masyarakat yang lebih sejahtera. Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman berupaya mewujudkan suatu daerah sebagai kabupaten yang bertumpu pada kekayaan alam dan keragaman budaya yang melekat pada Kabupaten Sleman dengan mengoptimalkan keunggulan lokal termasuk pemberdayaan masyarakat lokal.

Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman juga merupakan penyedia fasilitas berupa sarana-prasarana penunjang kegiatan wisata, dan penunjang kenyamanan dalam melayani wisatawan. Hal ini dikarenakan fasilitas juga dapat menjadi daya tarik sendiri untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Dinas Pariwisata menyediakan fasilitas untuk wisatawan dan pengelola desa wisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman memiliki *website* sendiri sebagai informasi kepada publik dan dapat berperan sebagai media promosi bagi Desa Wisata.

Desa wisata merupakan salah satu destinasi wisatayang saat ini sedang dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dalam rangka

meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wulan bahwa untuk pendapatan daerah dari destinasi wisata yang sudah ada sebenarnya tidak ada permasalahan yang berarti, dengan kata lain Dinas Pariwisata hanya tinggal mengembangkan dan memperbaiki fasilitas-fasilitas yang sudah ada.

Berbeda dengan destinasi wisata yang sudah beroperasi, desa wisata yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman masih membutuhkan pengembangan dan tindakan dari Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pariwisata karena pengembangan desa wisata sangat berpotensi untuk dijadikan alternatif strategis menjawab sejumlah agenda dalam pengembangan kegiatan pariwisata.

Keberadaan pengembangan desa wisata diharapkan dapat menambah kualitas dan kuantitas keberagaman produk atau diversifikasikan produk. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik yang sudah pernah maupun yang belum pernah berkunjung, fenomena ini juga akan berdampak pada pendapatan daerah.

Dalam mengembangkan Desa Wisata, Dinas Pariwisata memiliki program peningkatan sarana dan prasarana desa wisata. Program tersebut memiliki kegiatan yaitu pendampingan desa wisata. Pendampingan desa wisata dilakukan oleh Dinas untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola desa wisata dan masyarakat. Pendampingan juga bertujuan untuk memberdayakan pengelola desa wisata dan masyarakat. Mulai dari kegiatan wisata dari desa wisata tersebut, kelembagaan organisasi desa

wisata, memberikan masukan pengarahannya perihal pemeliharaan fasilitas dan sarana-prasarana yang dimiliki desa wisata. Secara tidak langsung kegiatan pendampingan desa wisata ini merupakan kegiatan sosialisasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman memiliki petugas sendiri dalam urusan pendampingan masing-masing desa wisata.

Pelatihan pemandu wisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Sedangkan program dari kegiatan pelatihan pemandu wisata tersebut yaitu pembinaan pemandu wisata. Pelatihan dari pemandu wisata berguna untuk meningkatkan ketrampilan, dan meningkatkan pelayanan bagi pengurus desa wisata dalam melayani wisatawan yang mengunjungi Desa Wisata. Pelatihan tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pendampingan dan pelatihan untuk bisa melayani wisatawan lebih baik lagi sehingga wisatawan merasa nyaman dan betah yang akan meningkatkan lama berkunjung wisatawan. Selain program pengembangan budaya dan peran serta masyarakat, pihak Dinas Pariwisata juga memastikan fasilitas umum. Fasilitas yang dibenahi antara lain toilet, mushola, area parkir, dan sebagainya agar layak digunakan oleh wisatawan.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2018, Dinas Pariwisata Klasifikasi Desa Wisata Sleman mengklasifikasikan Desa Wisata sebagai berikut:

- a. Kategori Tumbuh, sebanyak 14 Desa Wisata;
- b. Kategori Berkembang, sebanyak 11 Desa Wisata;

- c. Kategori Mandiri, sebanyak 11 Desa Wisata;
- d. Kategori Rintisan, sebanyak 11 Desa Wisata.

Dari hasil klasifikasi, perkembangan desa wisata di Kabupaten Sleman tidak banyak berubah, dalam artian tidak banyak desa wisata yang statusnya meningkat ke kategori selanjutnya. Selain itu juga terdapat desa wisata yang awalnya berada dalam kategori mandiri malah turun ke kategori berkembang

Diketahui juga bahwa terdapat beberapa desa wisata yang tidak aktif dan tidak ada manajemen pengelolaan bahkan ada desa wisata yang menyatakan diri bubar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman untuk memberikan pendampingan secara intensif dan/atau memberi perhatian lebih bagi desa wisata.

Lambatnya pengembangan desa wisata sebagai destinasi wisata baru, bahkan terdapat desa wisata yang tidak aktif merupakan hambatan bagi dinas pariwisata untuk lebih meningkatkan pendapatan. Ibu Wulan menyampaikan bahwa hambatan tersebut disebabkan oleh masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang ada, baik di lingkungan Dinas Pariwisata maupun di lingkungan desa wisata yang akan dikembangkan.

Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Pariwisata menyebabkan pengawasan oleh Dinas Pariwisata masih terbatas. Dinas Pariwisata tidak mampu untuk terus melakukan pengawasan dengan terjun langsung ke lapangan sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh desa wisata tidak tersalurkan ke Dinas Pariwisata dengan cepat,

dengan demikian dinas pariwisata tidak dapat segera memberikan solusi maupun tindakan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh desa wisata.

Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di lingkungan desa wisata juga merupakan faktor penghambat bagi perkembangan desa wisata. Masyarakat warga di sekitar desa wisata telah memiliki pekerjaan, sehingga sangat sulit untuk mencari sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten, memahami dan mengerti prinsip-prinsip dan konsep Desa Wisata, totalitas serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap kewajibannya.

Disampaikan oleh Ibu Wulan, program pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata tidak dapat berjalan maksimal karena sumber daya manusia untuk mengurus desa wisata masih sangat sangat sedikit, dan kebanyakan pengurus desa wisata juga disibukkan dengan pekerjaan lain, sehingga tidak dapat fokus pada pengembangan dan pengurusan desa wisata. Dengan demikian, tujuan dari program Dinas Pariwisata untuk membentuk desa wisata dengan manajemen atau pengelolaan dengan kelembagaan yang solid, fleksibel dan sederhana serta dinamis masih sulit untuk dilaksanakan.

Perkembangan pariwisata daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Desa. Kebijakan pemerintah desa adalah faktor yang paling menentukan perkembangan pariwisata di daerah ini, karena kontribusi dari Dinas pariwisata Kabupaten Sleman terhadap daerah tidak akan berdampak banyak jika pengembangan desa wisata masih belum menjadi prioritas Pemerintah Desa.

Dalam usaha pengembangan pariwisata, selain kesatuan langkah dari pemerintah, dinas terkait dan para *stakeholder*, peran serta atau dukungan masyarakat juga sangat diperlukan dalam pencapaian usaha pengembangan sektor pariwisata. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan pariwisata. Diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat sekitar obyek wisata agar ikut serta berpartisipasi mengelola, menjaga maupun melestarikan potensi wisata yang ada.

Lambatnya perkembangan desa wisata di Kabupaten Sleman menurut Dinas Pariwisata juga berdampak pada perekonomian masyarakat bahkan juga berdampak ke pendapatan daerah, karena sejatinya tujuan dari pengembangan desa wisata adalah bertujuan untuk membuka lapangan kerja baru, membuka peluang usaha yang pada akhirnya akan berdampak kepada meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata.